



 **BADAN PUSAT STATISTIK** 


# FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH



*disampaikan pada Koordinasi Penghimpunan Metadata  
Statistik Provinsi Riau Tahun 2023*

● ● ● ● ●

**Emilia Dharmayanthi, SST, M.Si.**  
Statistisi Ahli Madya


 Pekanbaru, 22 September 2023



 **BADAN PUSAT STATISTIK** 

# PENDAHULUAN

*Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik Provinsi Riau Tahun 2023*

 Pekanbaru, 22 September 2023 ● ● ●

# Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan



**Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019**  
 Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.



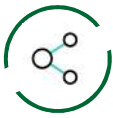
**SALINAN**

PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 39 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 SATU DATA INDONESIA

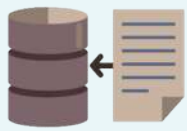
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan secara terbuka, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;



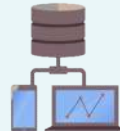
## MAKSUD DAN TUJUAN SDI



**Acuan Pelaksanaan dan Pedoman**  
Penyelenggaraan Tata Kelola Data



Ketersediaan Data yang **Akurat, Mutakhir, Terpadu**, dapat diper **tanggungjawabkan**, mudah diakses dan **dibagaipakai** antar instansi

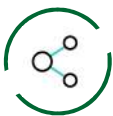


Mendorong **Keterbukaan** dan **Transparansi** Data



Mendukung **Sistem Statistik Nasional**

5



## PENTINGNYA DATA DALAM SATU DATA INDONESIA

### PRINSIP DATA

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Satu Kode Referensi/  
Data Induk



KEUANGAN NEGARA - KEMENKEU



STATISTIK - BPS



GEOSPASIAL - BIG



DATA LAINNYA

Dikoordinasikan oleh  
Bappenas

### Satu Data Indonesia



**Kebutuhan Mendesak**

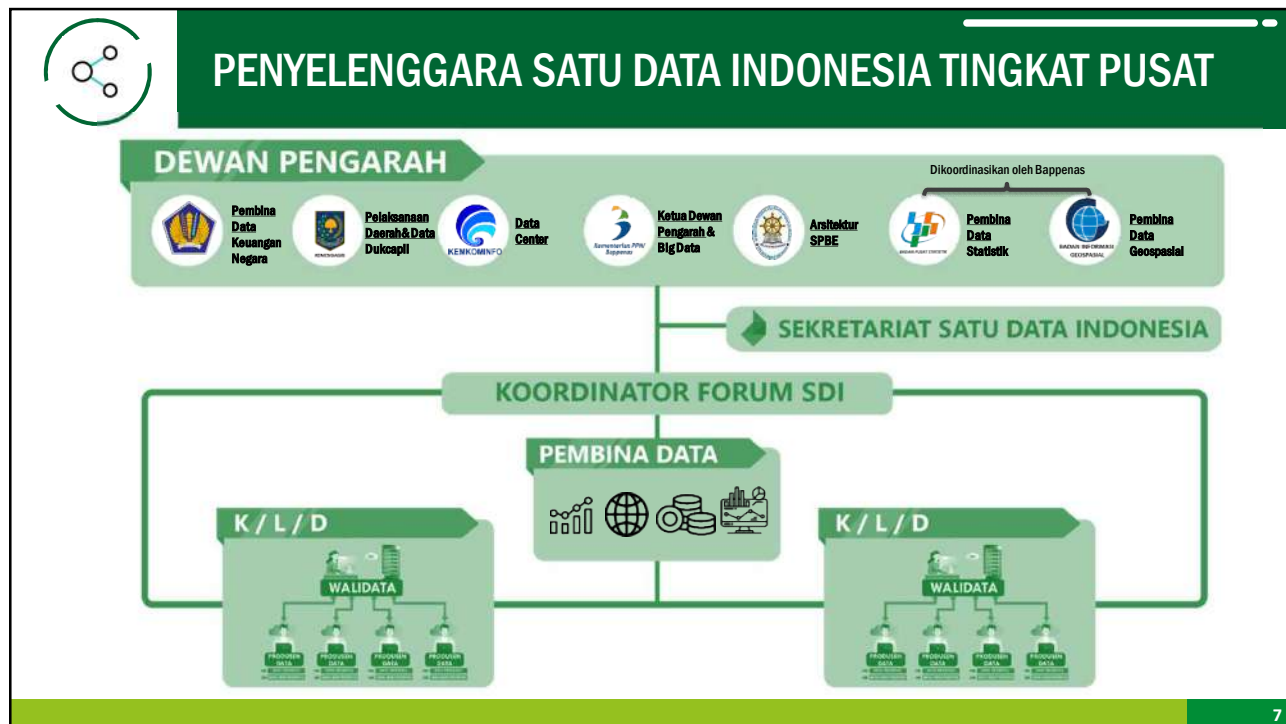


**SDGs**



**Perencanaan & Penganggaran**

6



## TUGAS PEMBINA DATA STATISTIK

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



### BPS RI sebagai Pembina Data Tingkat Pusat

1. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
2. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data
4. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
5. melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

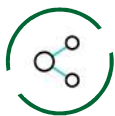


### BPS Prov dan Kab/Kota sebagai Pembina Data Tk. Daerah

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**HARMONIS DAN SELARAS**

9



## TUGAS WALIDATA DAN PRODUSEN DATA



**WALIDATA**

**Mengumpulkan, Memeriksa, dan Mengelola Data** berdasarkan Prinsip SDI

**Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk** di Portal SDI

**Membantu Pembina Data** dalam Membina Produsen Data.

**Memberi Masukan** mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.

**Menghasilkan Data** sesuai Prinsip SDI

**Menyampaikan Data dan Metadata** ke Walidata



**PRODUSEN DATA**

**PRODUSEN DATA**

10





BADAN PUSAT STATISTIK

**ST 2023**  
 SENSUS PERTANIAN

# FORUM SATU DATA

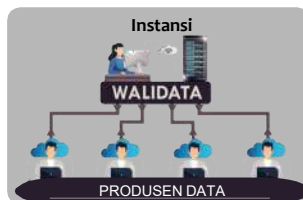
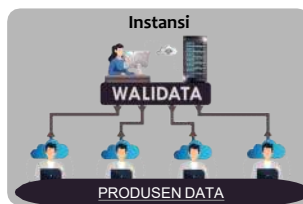
Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik Provinsi Riau Tahun 2023



Pekanbaru, 22 September 2023 •

## FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



Memberikan masukan standar data, data induk &amp; interoperabilitas data kepada Pembina Data



SEKRETARIAT SATU DATA

Dukungan teknis, operasional &amp; administratif



Memberikan arahan apabila diperlukan



“

**Forum Satu Data Indonesia** adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

”

## TUJUAN PENYELENGGARAAN FORUM SDI TINGKAT PUSAT

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

### Forum SDI Pusat melaksanakan tugas melalui kegiatan

Komunikasi

Koordinasi

Pengambilan Kesepakatan

#### Penentuan Daftar Data

- Sesuai dengan arsitektur SPBE;
- Kesepakatan Forum SDI Pusat;
- Rekomendasi Pembina Data;

#### Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN;
- SDGs;
- Mendesak / arahan Presiden;

#### Penentuan Rencana Aksi

- pengembangan SDM kompeten;
- penyusunan juknis pelaksanaan SDI;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- kegiatan terkait penyebarluasan Data;
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDI

Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Penentuan Calon Pembina Data Lainnya

Pembatasan Akses Data Tertentu

! Forum Satu Data Indonesia juga berperan dalam penyelesaian permasalahan tata kelola Data yang terjadi di Indonesia

13

## Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pembina Data Statistik  
Tk. Daerah



BPS Prov/Kab/Kota

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Kepala Daerah

Walidata Tk. Daerah



Perangkat Daerah Urusan Statistik

- SE Mendagri No.120/065/Bangda
- SE Mendagri No.120/066/Bangda
- Permendagri No.70/2019

Produsen Data



Perangkat Daerah

Walidata Pendukung Tk.  
Daerah



Sekretariat SDI Tingkat Pusat menyediakan Referensi Draft Peraturan Kepala Daerah tentang SDI tingkat Daerah

File dapat diunduh di portal kolaborasi SDI BPS:

<https://s.bps.go.id/forumsdi>

14



BADAN PUSAT STATISTIK

**ST 2023**  
 SENSUS PERTANIAN

# HUBUNGAN SDI PUSAT & DAERAH

Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik Provinsi Riau Tahun 2023



Pekanbaru, 22 September 2023

## PERAN PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

1

 Pembina Data Tk. Daerah  
 (Pasal 20)

2

 Walidata Tk. Daerah  
 (Pasal 21)

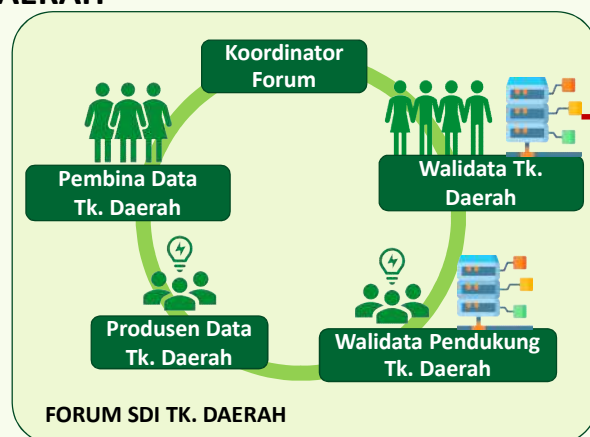
3

 Produsen Data Tk. Daerah  
 (Pasal 22)

4

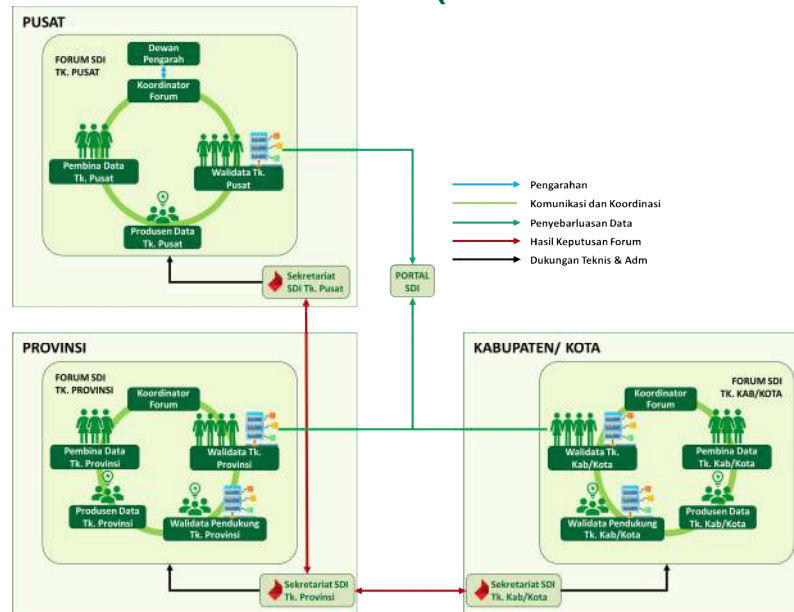
 Forum SDI Tk. Daerah  
 (Pasal 23)

### DAERAH

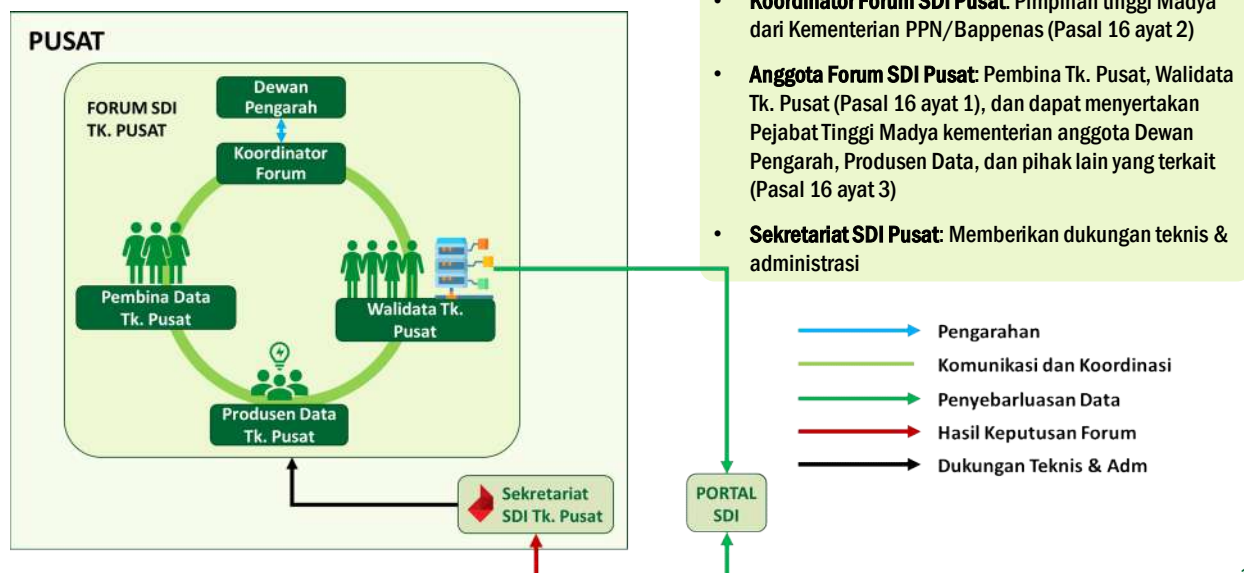




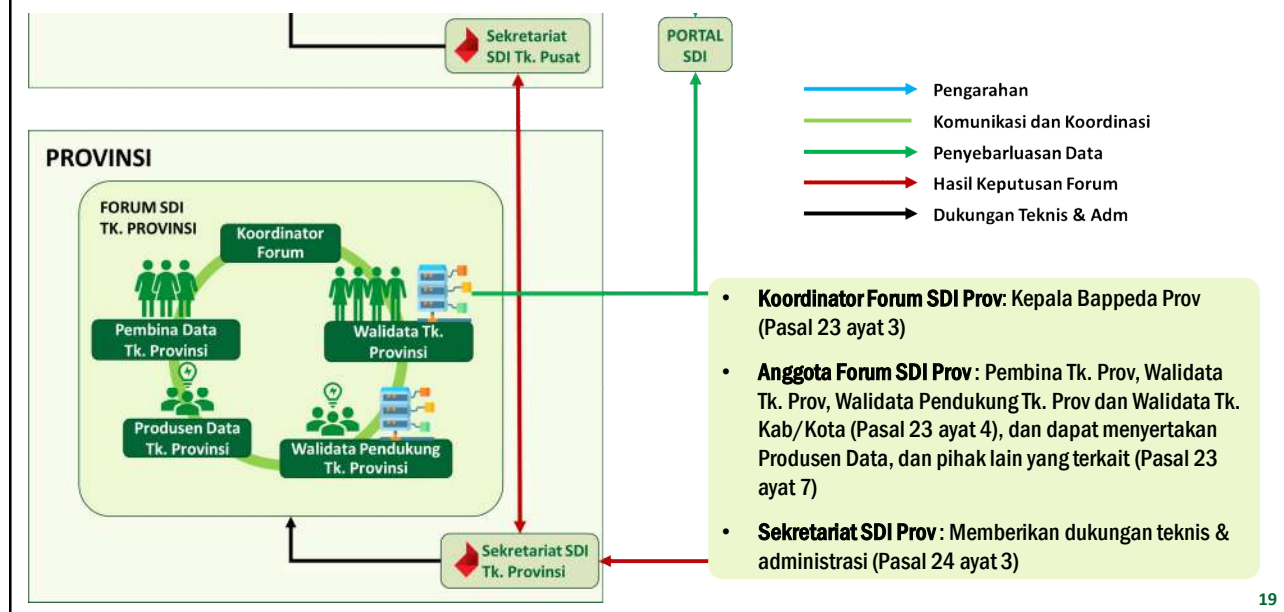
## MEKANISME KERJA FORUM SDI (PUSAT DAN DAERAH)



## MEKANISME KERJA FORUM SDI (PUSAT)

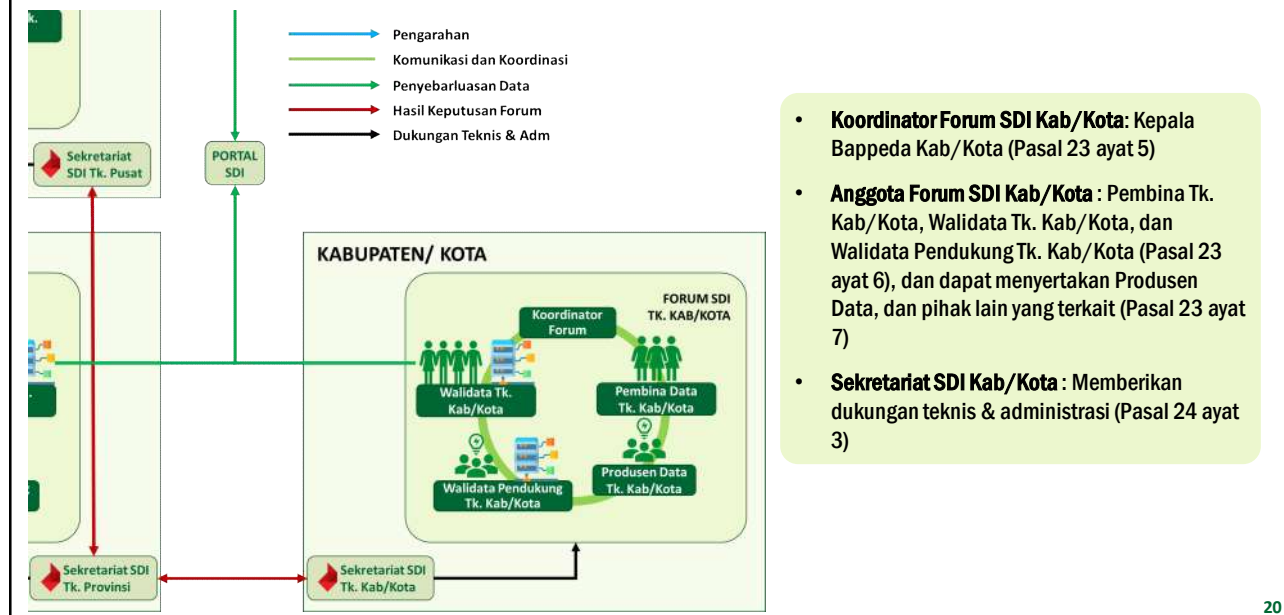


## MEKANISME KERJA FORUM SDI (PROVINSI)



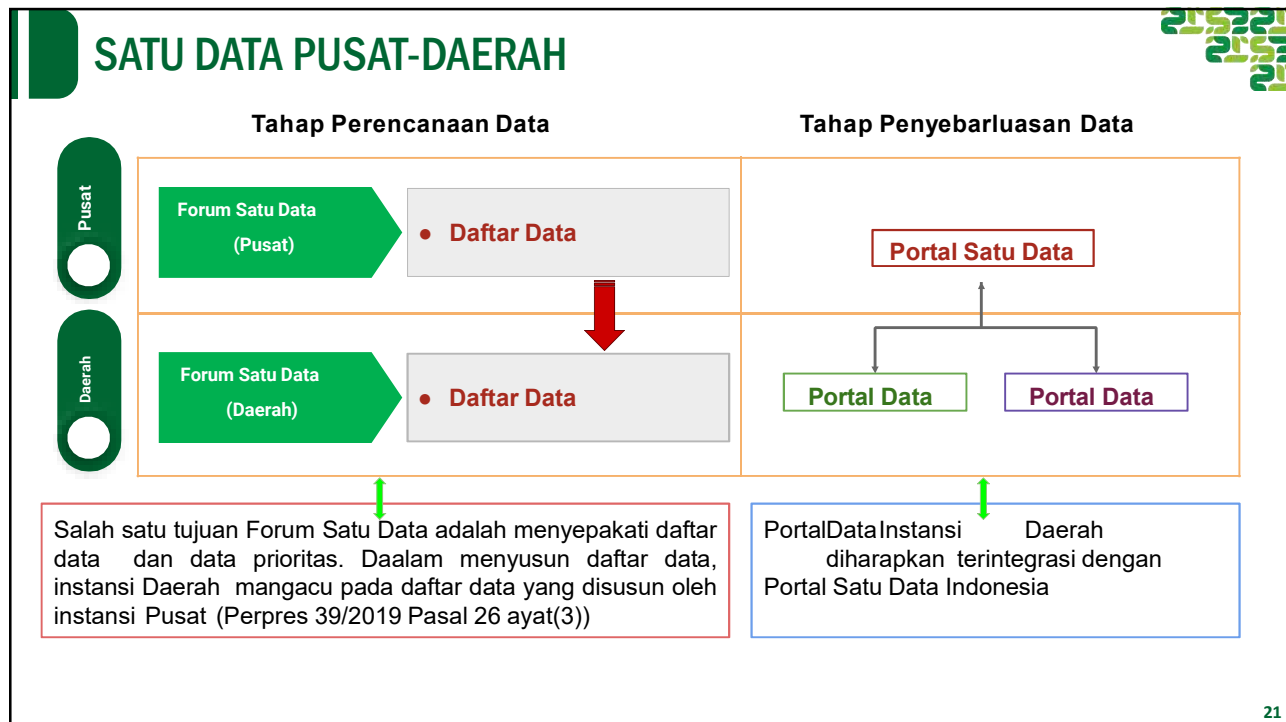
19

## MEKANISME KERJA FORUM SDI (KAB/KOTA)



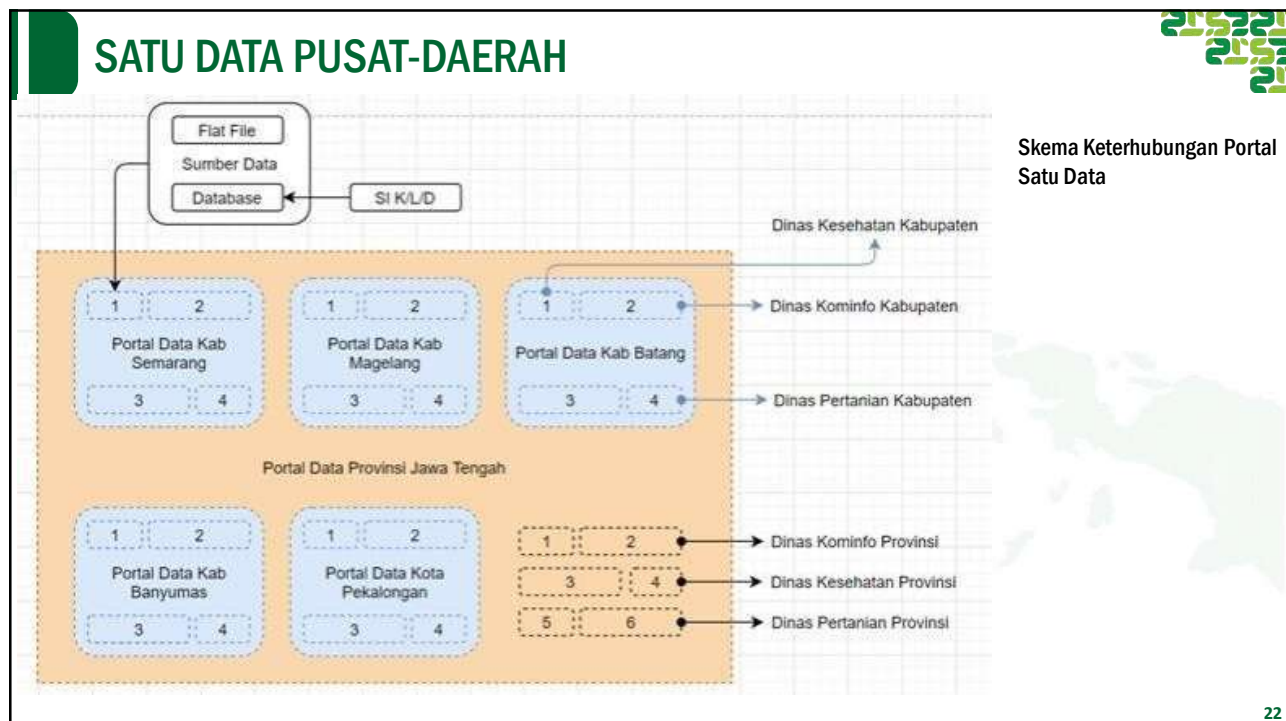
20

## SATU DATA PUSAT-DAERAH



21

## SATU DATA PUSAT-DAERAH



22



BADAN PUSAT STATISTIK

**ST 2023**  
 SENSUS PERTANIAN

# MEKANISME PENYELENGGARAAN SDI

Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik Provinsi Riau Tahun 2023



Pekanbaru, 22 September 2023

## SATU DATA PUSAT-DAERAH

Prinsip Satu Data Indonesia

Standar Data

Meta Data

Interoperabilitas

Kode Referensi

Pembentukan Kelembagaan

 Sekretariat  
 SDI (Pusat,  
 Provinsi,  
 Kab./Kota)

 Perpres,  
 Kepmen,  
 Perda

 Sekretariat  
 SDI (Pusat,  
 Provinsi,  
 Kab./Kota)

 Perpres,  
 Kepmen,  
 Perda

Pembina Data

 Perpres,  
 Permen,  
 Peraturan  
 Badan

 Walidata  
 (Pusat,  
 Provinsi,  
 Kab./Kota)

Permen, Perda

 Walidata  
 Pendukung  
 (Provinsi,  
 Kab./Kota)

Perda

 Produsen Data  
 (Pusat, Provinsi,  
 Kab./Kota)

Perda

Penyelenggaraan SDI

1

Perencanaan

2

Pengumpulan

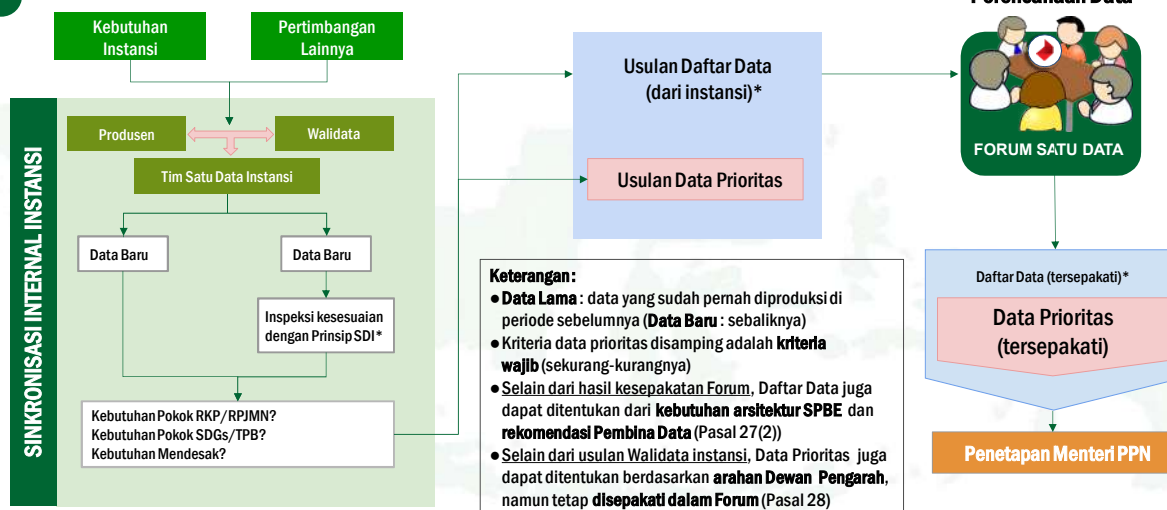
3

Pemeriksaan

4

Penyebarluasan

## Perencanaan: Daftar Data dan Data Prioritas



\*Sekretariat Menyediakan Instrumen : Inspeksi Prinsip SDI, Pengusulan, dan Kesepakatan Daftar Data Pengusulan untuk Data Lama disertai hasil inspeksi

25

## DAFTAR DATA



Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data

**Daftar Data** adalah tabel besar yang memuat kebutuhan data, ketersediaan data, serta data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pemerintah dengan atribut standar yang mengikuti metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data dan atribut lain yang memudahkan pengelolaan data

### ✓ Berisikan:

- Pengertian Daftar Data
- Tata cara Penyusunan Daftar Data
- Format Daftar Data

✓ Dapat diunduh di Portal Kolaborasi SDI BPS <https://s.bps.go.id/forumsdi>



### Format Daftar Data:

- Nama data
- Produsen data
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- Tagging SPBE




### Daftar Data digunakan:

- sebagai acuan oleh produsen data dalam pengumpulan data
- sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran

### Contoh Daftar Data Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi Di Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi Di Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	-	Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas terlatih yang menerima paket pemakanan di dalam panti sesuai standar gdl	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyandang disabilitas terlatih yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial





KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN  
NOMOR 8 /JUKLAK/SESMEN/12/2022  
TENTANG  
PENYUSUNAN DATA PRIORITAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja

**Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas**

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan sebagai berikut :

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SAJUDAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP-33A/TA/PPN/18/03/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penetapan Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKPP), mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat;

**Kepmen PPN No 33A Tahun 2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023**

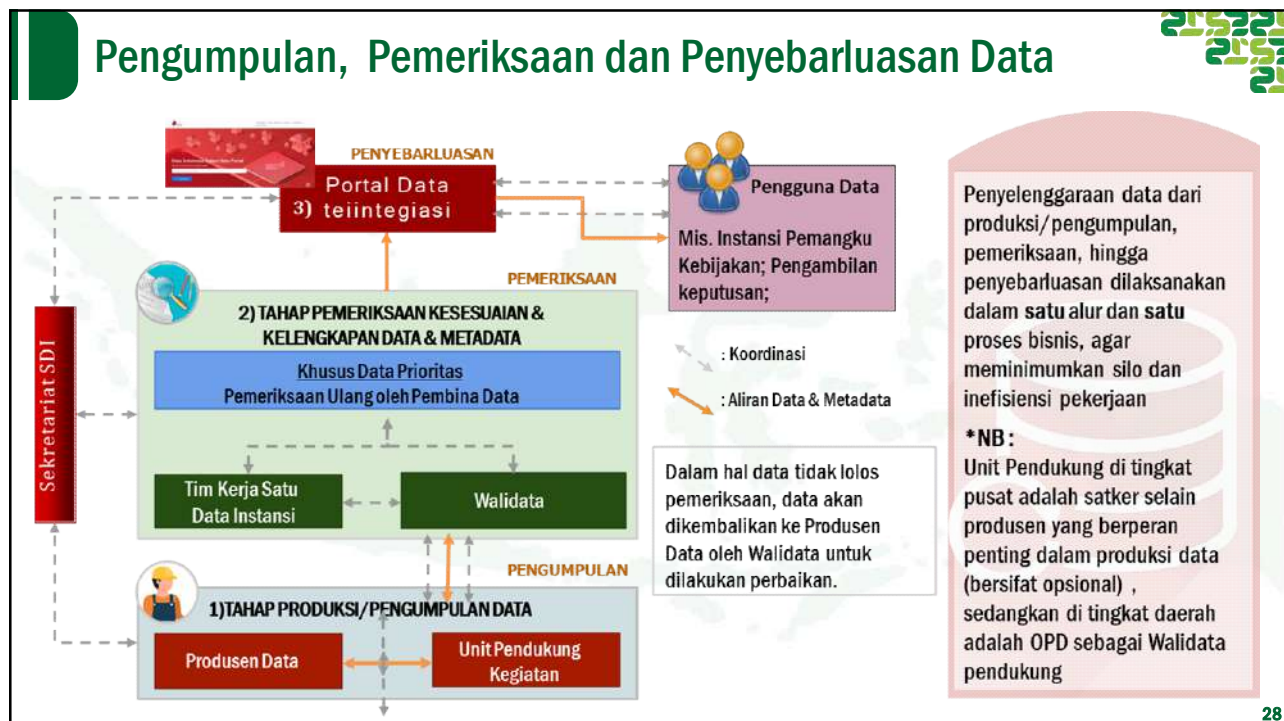
## DATA PRIORITAS

**Data Prioritas** adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia

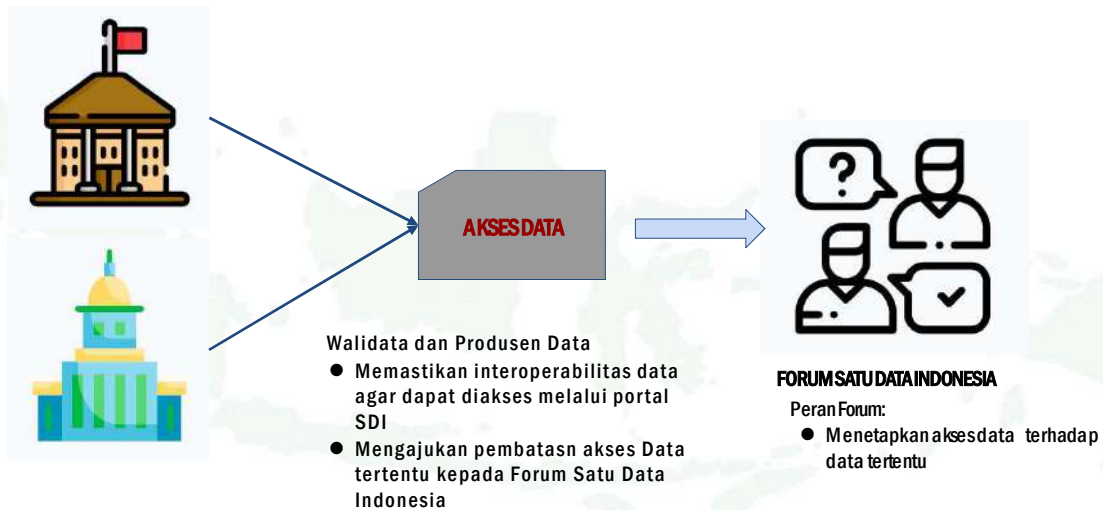
Dapat diunduh di Portal Kolaborasi SDI BPS  
<https://s.bps.go.id/forumsdi>

Format Data Prioritas

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD-SMIE	Tagging RPJMN/RKP	Tagging TPB/SDGs	Tagging Kebutuhan Mendesak
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN	Harian	Desember	Energi	PN - 5	7.1.1	-
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non-PLN	Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM	Bulanan	Desember	Energi	PN - 5	7.1.1	+

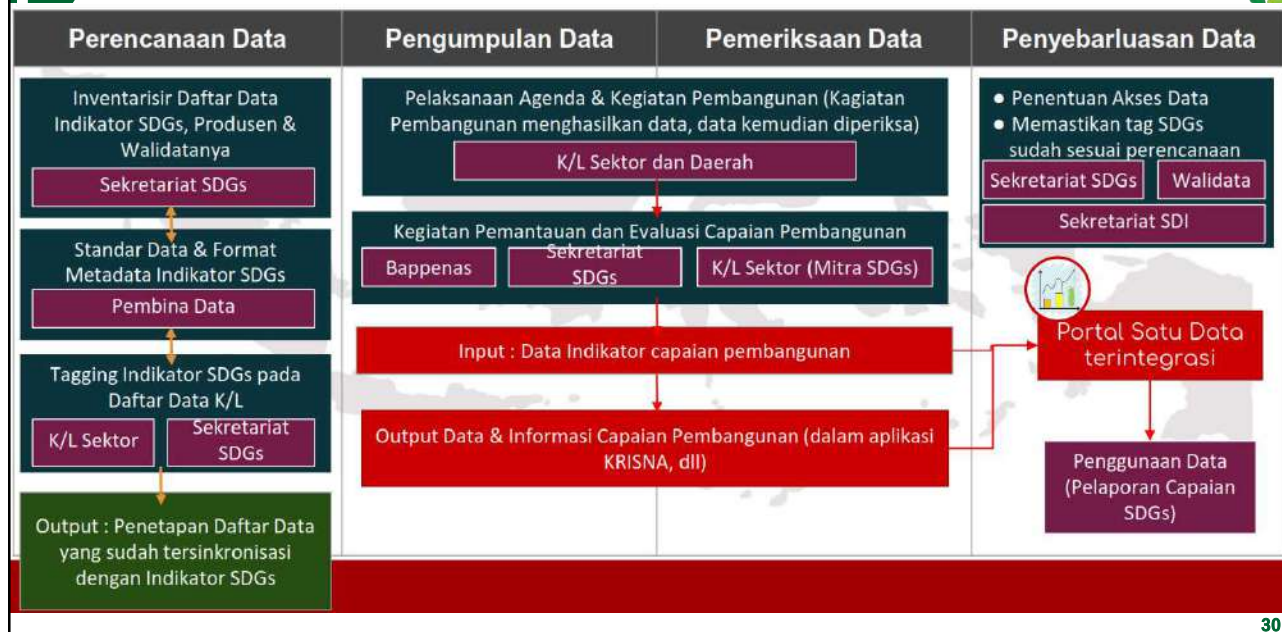


## KETENTUAN MENGENAI AKSES DATA (Pasal 37)



29

## Keterkaitan Tata Kelola Data SDI dan SDGs



30



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN


# RENCANA AKSI SDI

Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik Provinsi Riau Tahun 2023




Pekanbaru, 22 September 2023

● ●



# Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024







Program :

01. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia

Kegiatan / Keluaran	Target 2022	Target 2023	Target 2024
01.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data			
1	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data / Daftar Data dan Data Prioritas <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
2	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	
3	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>
4	Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
5	Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan dan Pembatasan Akses Data <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	


32

<div>  <h2>Rencana Aksi Satu Data Indonesia</h2> <p>Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024</p> </div> <div>  </div>				
Program :				
01. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia				
Kegiatan / Keluaran	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
01.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata				
1	Standar Data dan Metadata Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sistem</li> <li>1 Ketetapan SDS (6000)</li> <li>Pembinaan 15 K/L</li> <li>3 Klasifikasi Baku Statistik</li> <li>60% K/L Sasaran menerapkan MDS</li> <li>50% OPD sasaran menerapkan MDS</li> <li>1 Pembinaan Tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ketetapan SDS (7000)</li> <li>Pembinaan 40 K/L</li> <li>72% K/L Sasaran menerapkan MDS</li> <li>55% OPD sasaran menerapkan MDS</li> <li>1 Pembinaan Tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ketetapan SDS</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>76% K/L Sasaran menerapkan MDS</li> <li>70% OPD sasaran menerapkan MDS</li> <li>1 Pembinaan Tematik</li> </ul>
2	Standar Data dan Metadata Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>110 Standar Data IGT</li> <li>110 Metadata IGT</li> <li>1 Pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 Standar Data IGT</li> <li>10 Metadata IGT</li> <li>1 Pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>38 Standar Data IGT</li> <li>38 Metadata IGT</li> <li>1 Pembinaan</li> </ul>
3	Standar Data dan Metadata Keuangan Negara		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pembinaan</li> </ul>
33				



<div>  <h2>Rencana Aksi Satu Data Indonesia</h2> <p>Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024</p> </div> <div>  </div>				
Program :				
01. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia				
Kegiatan / Keluaran	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
01.3. Pengembangan dan Implementasi Kode Referensi dan Data Induk				
1	Kode Referensi dan Data Induk Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Kesepakatan</li> <li>2 Ketetapan Peta Batas Desa/Kel</li> <li>1 Set Kode Wilayah Administrasi</li> <li>1 Kajian Integrasi Data Spasial berbasis Data Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Ketetapan</li> <li>1 Purwarupa Integrasi Data Spasial berbasis Data Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Ketetapan</li> </ul>
2	Standar Data dan Metadata Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Instansi Pengguna Data Induk Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Instansi Pengguna Data Induk Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Instansi Pengguna Data Induk Kependudukan</li> </ul>
34				





<div>  <h2>Rencana Aksi Satu Data Indonesia</h2> <p>Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024</p> </div>			
Program :			
02. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data			
Kegiatan / Keluaran	Target 2022	Target 2023	Target 2024
02.1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia			
1	Kebijakan Percepatan Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Kebijakan</li> </ul>	
2	Kebijakan Percepatan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Implementasi Awal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pemutakhiran Kebijakan</li> </ul>
3	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Kebijakan</li> <li>1 Kesepakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kesepakatan</li> </ul>
4	Instrumen Pedoman Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> <li>Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
5	Instrumen Pedoman Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> <li>Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
6	Pedoman Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>Bimbingan 82 K/L*</li> <li>Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>

<div>  <h2>Rencana Aksi Satu Data Indonesia</h2> <p>Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024</p> </div>			
Program :			
02. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data			
Kegiatan / Keluaran	Target 2022	Target 2023	Target 2024
02.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia			
1	Percepatan Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>31 K/L</li> <li>25 Provinsi</li> <li>149 Kab/Kota (kumulatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>82 K/L</li> <li>30 Provinsi</li> <li>241 Kab/Kota (kumulatif)</li> </ul>
2	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>82 K/L</li> <li>34 Provinsi</li> <li>390 Kab/Kota (kumulatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34 Provinsi</li> <li>90 Kab/Kota (kumulatif)</li> <li>251 Kab/Kota (kumulatif)</li> </ul>
3	Implementasi Manajemen Data, serta Arsitektur Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>34 Provinsi</li> <li>90 Kab/Kota (kumulatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34 Provinsi</li> <li>251 Kab/Kota (kumulatif)</li> </ul>
4	Penguatan Sistem Statistik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Perpres Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>Implementasi K/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bimbingan</li> <li>Implementasi 34 Provinsi*</li> </ul>
5	Penguatan Sistem Statistik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bimbingan</li> <li>Implementasi 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Perpres</li> </ul>
6	Penguatan Sistem Statistik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bimbingan</li> <li>Implementasi 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sosialisasi</li> </ul>
02.3. Penatakelolaan Kerja sama dan Bagipakai Data Nasional			
1	Kerja sama dan Bagipakai Data dengan Lembaga Negara, Badan Hukum, dan Lembaga Publik Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kesepakatan</li> </ul>
2	Kerja sama dan Bagipakai Data dengan Swasta		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>1 Kesepakatan</li> </ul>



<div>  <h2>Rencana Aksi Satu Data Indonesia</h2> <p>Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024</p> </div> <div>  </div>				
<b>Program :</b> <b>03. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data</b>				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
<b>03.1. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Teknologi Informasi Nasional</b>				
1	Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Layanan Integrasi Portal SDI – Portal Data BPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koneksi PD Bappenas - PDNS Kominfo – PD Pembina Data</li> <li>1 Pedoman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Layanan Integrasi Portal SDI – Portal Kebijakan Satu Peta</li> </ul>
2	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi Portal SDI - INDAH BPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi Portal SDI - SPLP Kemenkeu</li> </ul>	
3	Fasilitas Pusat Data untuk Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi High Availability Portal SDI di VPS Bappenas</li> </ul>		
<b>03.2. Pengembangan Portal dan Pengayaan Konten Data Satu Data Indonesia</b>				
1	Pedoman/Petunjuk Pendukung Penyelenggaraan Portal Satu Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Pedoman/ Petunjuk (pemutakhiran)</li> </ul>
2	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sistem (pemutakhiran)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sistem (pemutakhiran)</li> </ul>
3	Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 Kab/Kota</li> <li>45 KL</li> <li>34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 Kab/Kota</li> <li>60 KL</li> <li>34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 Kab/Kota</li> <li>82 KL</li> <li>34 Provinsi*</li> </ul>

37

<div>  <h2>Rencana Aksi Satu Data Indonesia</h2> <p>Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024</p> </div> <div>  </div>				
<b>Program :</b> <b>03. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data</b>				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Pedoman/Petunjuk Pendukung Penyelenggaraan Portal Satu Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Pedoman/ Petunjuk (pemutakhiran)</li> </ul>
2	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sistem (pemutakhiran)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Sistem (pemutakhiran)</li> </ul>
3	Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 Kab/Kota</li> <li>45 KL</li> <li>34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 Kab/Kota</li> <li>60 KL</li> <li>34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 Kab/Kota</li> <li>82 KL</li> <li>34 Provinsi*</li> </ul>
4	Manajemen Risiko Portal Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laporan</li> <li>1 Kesepakatan Penguatan CSIRT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>1 Sistem</li> <li>1 Laporan CSIRT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laporan CSIRT</li> </ul>
<b>03.3. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data</b>				
1	Sistem Analitika Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sistem</li> <li>1 Infrastruktur Analitika Data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sistem Pengayaan &amp; Pemutakhiran</li> <li>Peningkatan Kapasitas Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Sistem Pengayaan &amp; Pemutakhiran</li> <li>Peningkatan Kapasitas Infrastruktur</li> </ul>
2	Model Visualisasi dan Dashboard	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Purwarupa Dashboard Analitika (2 Isu Strategis)</li> <li>1 Purwarupa Dashboard Eksekutif (2 Isu Strategis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengayaan dan pemutakhiran analitika data dan dashboard eksekutif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengayaan dan pemutakhiran dashboard yang sudah ada</li> </ul>

## Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

Program :

04. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik

Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
04.1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia				
1	Standar Kompetensi dan Formasi Aparatur Negara Penyelenggara Satu Data sebagai bagian dari SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kebijakan</li> <li>1 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kebijakan (Pemutakhiran)</li> <li>Pelaksanaan Rekrutmen Fungsional</li> <li>1 Kajian</li> <li>Pelaksanaan Sertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Rekrutmen Fungsional Kebutuhan SDI</li> <li>Pelaksanaan Sertifikasi</li> <li>Pelaksanaan Peningkatan Remunerasi</li> </ul>
2	Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan</li> <li>82 K/L*</li> <li>34 Provinsi*</li> <li>209 Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan</li> <li>82 K/L*</li> <li>34 Provinsi*</li> <li>514 Kab/Kota*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan</li> <li>82 K/L*</li> <li>34 Provinsi*</li> <li>514 Kab/Kota*</li> </ul>
04.2. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia				
1	Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fitur Komunitas Ahli dlm Portal SDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran fitur</li> <li>Integrasi Master Data Komunitas Ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran Master Data Komunitas Ahli</li> </ul>
2	Kegiatan Pendukung Partisipasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Talkshow</li> <li>1 Webinar</li> <li>1 Lokakarya SDI</li> <li>Launching Portal SDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Talkshow</li> <li>1 Webinar</li> <li>1 Lokakarya SDI</li> <li>Seremonial Award SDI</li> <li>Seremonial Rinduk SDI 2025-2045</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Talkshow</li> <li>1 Webinar</li> <li>1 Lokakarya SDI</li> <li>Seremonial Award SDI</li> </ul>

39

## PELAKSANAAN RENCANA AKSI SDI



### Perpres 39/2019 Pasal 30 (3)

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan **penyelenggara Satu Data tingkat daerah** melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.



### Perpres 39/2019 Pasal 30 (5)

**Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah** memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Kepala daerah secara berkala

40

